



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 377 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA RELAWAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KECAMATAN JATINANGOR
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan dan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tidak terlepas dan peran aktif relawan yang secara langsung terjun ke masyarakat yang terdampak;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan kepada Seseorang atau Badan yang Telah Berjasa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat, tokoh masyarakat yang telah berjasa kepada Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Relawan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

12. Peraturan Menteri ...

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang atau Badan yang Telah Berjasa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 1994 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 79 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil, Tokoh Masyarakat dan Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 79);
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 40);
20. Peraturan Bupati ...

20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA RELAWAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Memberikan Pemberian Penghargaan Kepada Relawan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedng. dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 September 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 377 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA RELAWAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI
KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN
SUMEDANG.

DAFTAR
RELAWAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KECAMATAN
JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG.

NO	RELAWAN
1.	KECAMATAN JATINANGOR
2.	KORAMIL 1005 JATINANGOR
3.	POLSEK JATINANGOR
4.	BRIMOB POLDA JABAR
5.	KIMIA BIOLOGI RADIO AKTIF GEGANA BRIMOB POLDA JABAR
6.	POS GABUNGAN SIAGA BENCANA JAWA BARAT
7.	BPBD KABUPATEN SUMEDANG
8.	SATGAS PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN JATINANGOR
9.	KELUARGA BESAR FKPI KECAMATAN JATINANGOR
10.	RESIMEN BELA NEGARA KB FKPI KABUPATEN SUMEDANG
11.	SAR KB FKPI KOTA BANDUNG
12.	KELUARGA ALUMNI FAKULTAS PERTANIAN UNPAD
13.	PEMUDA PANCASILA KECAMATAN JATINANGOR
14.	IMEC JABAR
15.	RMG UWAIS BANDUNG
16.	JEEP STATION DISASTER RESPONSE
17.	SADULUR SAJALUR 4X4 ADVENTURE OFF ROAD
18.	JERCY
19.	ANSOR

20.	BANSER
21.	IPSI JATINANGOR
22.	BBC DPC JATINANGOR
23.	GMBI JATINANGOR
24.	CARE U
25.	TENTARA LANGIT
26.	WANAPALA JATINANGOR
27.	BIMAPALA
28.	TAPAK PA
29.	BARA BAJA
30.	MAHATVA FAKULTAS PERTANIAN UNPAD
31.	HIMPALA CICALENGKA
32.	MAPALA ARKARA
33.	GEBER MASJID
34.	AKHWAT BERGERAK BANDUNG
35.	PA RIKSA BUMI
36.	LAZIS DARUL HIKAM
37.	SUNDAWANI JATINANGOR
38.	VIKING JATINANGOR
39.	AL UKHUWAH BIKERS BROTHERHOOD MC
40.	POSPERA JATINANGOR
41.	SBMC
42.	BBC BERLIN SUMEDANG
43.	SATRIA SUMEDANG
44.	RUMAH ZAKAT ACTION
45.	MANGGALA GARUDA PUTIH JATINANGOR
46.	OCC BATIM
47.	GPA BATIM
48.	BIKERS BROTHERHOOD MC
49.	LITTLE PROJCT

50.	RAKYAT JATINANGOR BERSATU
51.	MAJELIS DZIKIR & NASIHAT AT JAGORRUSY
52.	XTC JATINANGOR
53.	ASOR BROTHER'S
54.	SUMARINTIS JATINANGOR
55.	PAGAR JATINANGOR
56.	XTC INDONESIA KESEHATAN & SOSIAL KEMASYARAKATAN
57.	SRIKANDI PEMUDA PANCASILA JATINANGOR
58.	KOMPAS JATINANGOR
59.	SATGAS UNISA

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001